

**PENGARUH PKS (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) SEBAGAI PARTAI
ISLAM DALAM DUKUNGAN INDONESIA TERHADAP PALESTINA DI
ERA JOKOWI**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD MAULIDAN

(18323110)

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

**PENGARUH PKS (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) SEBAGAI PARTAI
ISLAM DALAM DUKUNGAN INDONESIA TERHADAP PALESTINA DI
ERA JOKOWI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana 1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD MAULIDAN

(18323110)

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH PKS (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) SEBAGAI PARTAI
ISLAM DALAM DUKUNGAN INDONESIA TERHADAP PALESTINA DI
ERA JOKOWI

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh Sarjana S1
Hubungan Internasional

Pada Tanggal
5 Agustus 2022

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana, S.IP., B.Int.,St., M.A

Dewan Penguji

- 1 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 3 Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

07 Januari 2021



Muhammad Maulidan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan untuk:

Bapak H. Rusdiansyah dan Hj. Hertiana

Terima kasih atas kasih sayang, doa, motivasi, harapan, pemahaman, kesabaran, dan nasihat yang selalu kalian berikan

Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.

Terima kasih atas doa serta dukungan yang telah berikan. Terima kasih sudah mengajarkan saya untuk menjadi seseorang dan selalu memberikan kesempatan untuk maju yang membuat saya menjadi ingin Nahdliyyin sejati



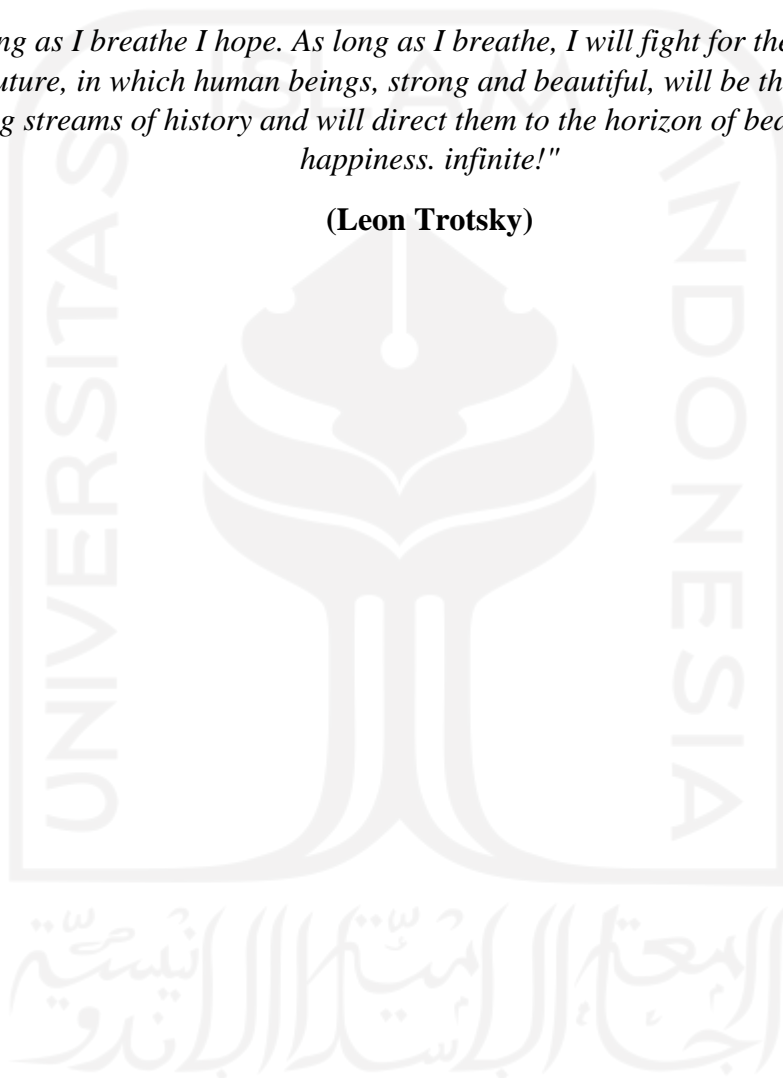
HALAMAN MOTTO

“The more you know, The more you don’t know”

(Muhammad Maulidan)

"As long as I breathe I hope. As long as I breathe, I will fight for the future, that bright future, in which human beings, strong and beautiful, will be the rulers of the drifting streams of history and will direct them to the horizon of beauty, joy and happiness. infinite!"

(Leon Trotsky)



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah subhanallahuwa ta ta'allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat, karunia, dan rahmat yang telah diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik. Penulis menyadari bahwa lahirnya karya sederhana ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak, sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi dengan hasil yang baik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak rasa syukur dan terima kasih atas berbagai bentuk dukungan dan bantuan baik berupa moril dan materil. Tak terhitung pengalaman serta ilmu yang penulis dapatkan selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ditengah jenuhnya situasi pandemi.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
3. Ibu Dr. Phil. Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Hangga Fathana, S.IP., St., M.A selaku Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.
5. Willi Ashadi, S.H.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas waktu, bimbingan, serta bantuan yang bapak berikan dalam proses penyelesaian tugas akhir ditengah kesibukan dan keseharian bapak. Terima kasih atas segala bentuk motivasi, ilmu dan saran yang bapak sampaikan sehingga membuat diri ini merasa semakin percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT.
6. Kepada Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc. selaku Dosen yang selalu membantu saya, memberikan kesempatan saya untuk maju, memberi arahan kepada saya untuk berproses, saya banyak berterima kasih kepada Bapak Hadza karena menjadi salah satu inspirasi saya dan saya anggap Ayah kedua saya selama di tanah rantau ini. Saya semakin menjadi Nahdliyin ketika mendapatkan pelajaran dari Bapak. Semangat dakwah Islam Nusantaranya Pak!.
7. Kepada Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A., PhD (cand). Saya ucapkan terimakasih selama waktu saya berkuliah telah memberi banyak pengalaman yang tidak pernah saya dapatkan apabila tidak bertemu bapak. Terima kasih sudah menjamu mahasiswa seperti saya

untuk kerumah. Saya ucapkan disertai Bung Gera keren sekali!, ditunggu publikasi agar kami masyarakat bisa membaca semua.

8. Seluruh dosen dan civitas akademika Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Berkat pengorbanan, ketulusan, kebaikan, dan ilmu pengetahuan yang Bapak dan Ibu berikan, kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna. Tak lupa juga saya ucapkan kepada Mbak Mardiatul Hasanah selaku staff prodi HI UII yang selalu membantu kami dengan kesabaran, baik dalam urusan-urusan akademik dan juga membantu dalam masalah penyelesaian skripsi ini. Semoga program studi HI UII akan selalu sukses dan membanggakan dari segi kualitas pendidikan yang diberikan.
9. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan saya dukungan, kasih sayang, dan juga memahami apa saja yang saya harapkan. Terima kasih karena selalu menjadi orang tua yang paling saya banggakan dan menjadi teman diskusi dalam segala hal. Tanpa dukungan kalian, perjalanan saya di masa kuliah dan menyelesaikan tugas akhir akan terasa lebih berat dan penuh rintangan.
10. Kepada kakak dan adik saya Fhirda Maulidina Nur, S.Psi, Apt. Rahmida Fadhliya, S.Farm. dan Habiburrahman, terima kasih karena selalu mendukung saya setiap saat.

11. Kepada *Support System* saya Haanii Laras Qothrunnadaa yang telah ada untuk saya, siap untuk membantu saya dalam waktu apapun, selalu mendukung saya disaat dibawah dan diatas, terima kasih telah menjadi bagian dari proses perjalanan hidup saya. Semangat Haanii untuk penelitian Skripsinya, semoga Haanii menjadi dokter yang berguna untuk bangsa dan negara.
12. Kepada sahabat saya, Alpin, Ayiq, Rasya, Bayu, Ajay, Terry, Ibeng, Verdi dan Salem. Terima kasih karena menjadi rekan saya dalam berbagai macam ujian kehidupan selama ini. Terima kasih selalu ada disaat saya suka dan duka, terima kasih selalu menjadi partner disegala situasi. Kehangatan dan keceriaan kalian adalah kenangan yang begitu indah dimasa kuliah, Semoga kalian semua sukses dan menjadi oligarki bagi negara ini, tolong teman teman saya jangan korupsi.
13. Kepada teman belajar saya Nadiyah Kholilah Yahya, Ari Septian Putri, Akmal Maulana AR, Alifya Kasih, Dimas Surya, dan Gufron Ghozali yang telah membantu saya dalam belajar, menjadi tim untuk berkembang bersama, dan selalu meramaikan kelas ketika sedang berkuliah. Terimakasih karena selalu menjadi motivasi untuk saya selama berkuliah. Kita hebat karena kita PBBA.
14. Kepada teman NU saya Alpin, Abel, Asyrof, Bayu dan Hanif. Kalian keren, saya salut dengan identitas yang kalian bawa. Tetap jaga ke NU-an kalian dan semangat untuk Islam Nusantaranya!.

15. Kepada teman Kalimantan saya yakni Rizki Ghifari dan Gilang Yowandika, semoga kalian semua tetap menjaga identitas Kalimantan.
16. Kepada anak kost bu tini yakni Kakha, Dena yang selalu siap kalau saya minta tolong.
17. Kepada sahabat saya di SMA Unggulan Kalimantan Timur yakni M. Zainur Hapif, M Irfan Ah'Sha. Terimakasih sudah menyediakan bantuan darurat dan selalu siap kalau saya ingin merepotkan.
18. Kepada sahabat saya di Taman Borobudur Indah dan Grand Mahsyur Malang yakni Ezra Fadhil, Afif, Ali, Arie, Abay, Reza, Tala, Roid, Hendi. Terimakasih sudah menyediakan tempat di Malang untuk saya bertemu *support system* saya. Terimakasih sudah memberi arti bahwasanya Malang adalah rumah ketiga saya.
19. Kepada teman-teman di HI UII Angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih karena menjadi teman baik saya selama berkuliah di Hubungan Internasional UII.
20. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than i receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all the time.*

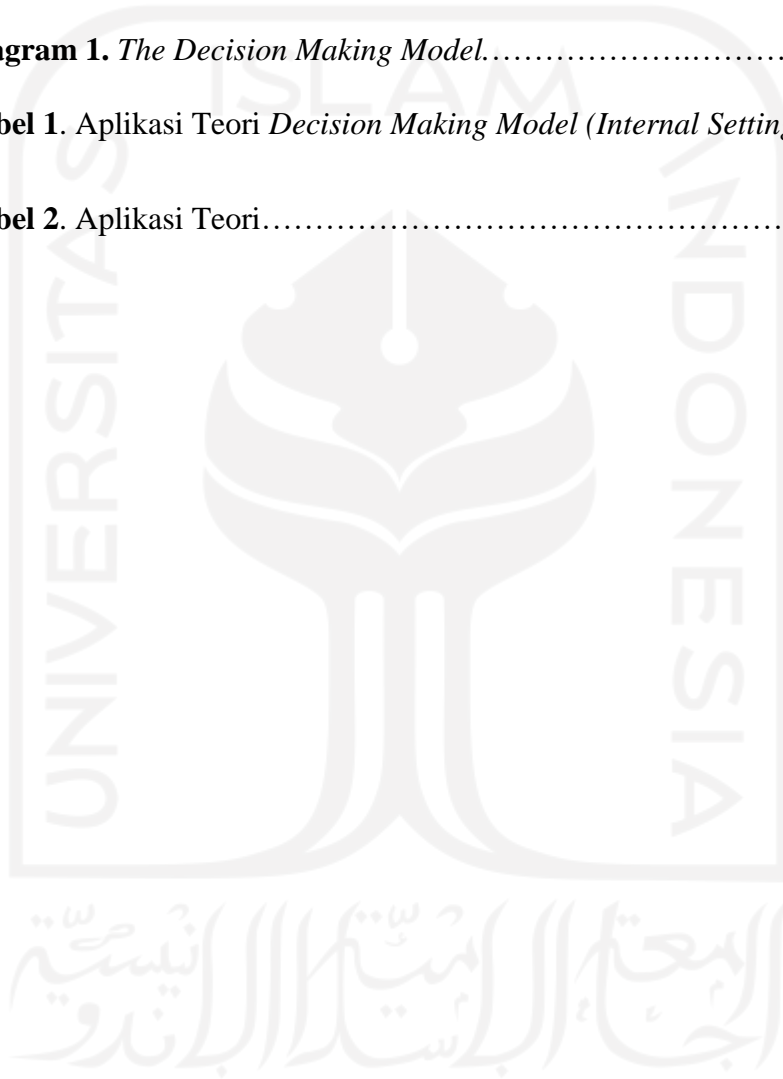
DAFTAR ISI

PENGARUH PKS (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) SEBAGAI PARTAI ISLAM DALAM DUKUNGAN INDONESIA TERHADAP PALESTINA DI ERA JOKOWI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
ABSTRAK	1
ABSTRACT.....	1
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran.....	13
1.7 Argumen Sementara	16
1.8 Metode Penelitian	16
<i>1.8.1 Jenis Penelitian.....</i>	<i>16</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....</i>	<i>17</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>17</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>17</i>
1.9 Sistematika Penelitian.....	18
BAB 2 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI PARTAI ISLAM DALAM DUKUNGAN INDONESIA TERHADAP PALESTINA	20

2.1 Proses pembentukan Partai Keadilan Sejahtera.....	20
2.1.1 Faktor Internal terbentuknya PKS.....	20
2.1.2 Faktor Eksternal terbentuknya PKS	22
2.2 Gagasan dan Kepentingan PKS di Indonesia	24
2.3 PKS dalam isu Palestina	25
2.4 Kebijakan Indonesia dalam dukungan Palestina di era Jokowi.....	28
BAB 3 PENGARUH PKS (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) SEBAGAI PARTAI ISLAM DALAM DUKUNGAN INDONESIA TERHADAP PALESTINA DI ERA JOKOWI DITINJAU DARI <i>DECISION MAKING</i>	30
3.1 Aplikasi Teori	31
3.2 Analisis studi kasus lewat faktor internal	32
3.2.1 <i>Non-Human Environment</i>	32
3.2.2. <i>Society</i>	34
3.2.3 <i>Human Environment (Culture, Population)</i>	36
3.3 Pengaruh PKS dalam dukungan Indonesia	37
BAB 4 PENUTUP.....	40
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran dan Rekomendasi	44
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Gambar 1. Data penyebaram Ikhwanul Muslimin.....	3
Diagram 1. <i>The Decision Making Model</i>	17
Tabel 1. Aplikasi Teori <i>Decision Making Model (Internal Setting)</i>	31
Tabel 2. Aplikasi Teori.....	31



DAFTAR SINGKATAN

PKS: Partai Keadilan Sejahtera

IM: Ikhwanul Muslimin

KAMMI: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia

PK: Partai Keadilan

AD-ART: Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga

UGM: Universitas Gajah Mada

UI: Universitas Indonesia

ITB: Institut Teknologi Bandung

IPB: Institut Pertanian Bogor

LDK: Lembaga Dakwah Kampus

FSLDK: Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus

KTT: Konferensi Tingkat Tinggi

PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa

DPR RI: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

GARBI: Gerakan Arah Baru Indonesia

Gelora: Gelombang Rakyat Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bagaimana sebuah partai politik dapat mempengaruhi proses kebijakan, Indonesia adalah negara yang mengalami gerakan tersebut lewat Partai Keadilan Sejahtera. Sejak revivalisme Islam dimulai PKS dilirik sebagai Partai Islam yang memiliki kepentingan nasional untuk menyuarakan umat Islam. Situasi politik identitas di Indonesia membuat Partai Keadilan Sejahtera mengambil tempat yang cukup besar dalam menyuarakan isu kemerdekaan Palestina. PKS mendukung Palestina dengan melakukan advokasi politik seperti pernyataan pers, aktivitas palermen, mobilisasi massa dan demo. Advokasi tersebut membuat Indonesia menghadapi tekanan domestik untuk selalu mendukung negara Palestina. Ini juga ditinjau dengan teori *decision making* dalam faktor internalnya bahwasanya Indonesia melakukan arah kebijakan tersebut berdasarkan beberapa faktor yang salah satunya politik domestik, hal ini mengartikan bahwasanya apabila Indonesia tidak merumuskan kebijakan untuk tetap mendukung Palestina maka yang dikhawatirkan adalah terjadinya instabilitas politik di Indonesia. Hal ini didukung dengan dua periode presiden Jokowi yang lebih *inward looking* dengan fokus kepada aspek politik domestic. Lebih dari itu Indonesia sudah dibangun dengan opini publik yang akan selalu setuju terhadap Palestina dan menganggap konflik tersebut adalah konflik agama. Penelitian ini akan menjawab lewat teori Snyder yang menghasilkan jawaban bahwasanya advokasi politik yang dilakukan PKS memiliki pengaruh terhadap dukungan Indonesia seperti di Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB.

Kata Kunci: PKS, Decision Making, Jokowi.

ABSTRACT

This study analyzes how a political party can influence the policy process, Indonesia is a country that experienced the movement through the Prosperous Justice Party. Since Islamic revivalism began, PKS has been seen as an Islamic party that has national interests to voice Muslims. The identity politics situation in Indonesia has made the Prosperous Justice Party (PKS) take a large place in voicing the issue of Palestinian independence. PKS supports Palestine by carrying out political advocacy such as press statements, parliamentary activities, mass mobilization and demonstrations. This advocacy has made Indonesia face domestic pressure to always support a Palestinian state. This is also reviewed with decision making theory in its internal factors that Indonesia carries out the policy direction based on several factors, one of which is domestic politics, this means that if Indonesia does not formulate policies to continue to support Palestine, what is feared is the occurrence of political instability in Indonesia. This is supported by Jokowi's two more inward-looking presidential terms with a focus on domestic political aspects. Moreover, Indonesia has been built with public opinion that will always agree with Palestine and considers the conflict to be a religious conflict. This research will answer through Snyder's theory which produces an answer that the political advocacy carried out by PKS has an influence on Indonesia's support such as in the UN Permanent Security Council.

Key Words: Prosperous Justice Party, Decision Making, Jokowi.

BAB 1

PENDAHULUAN

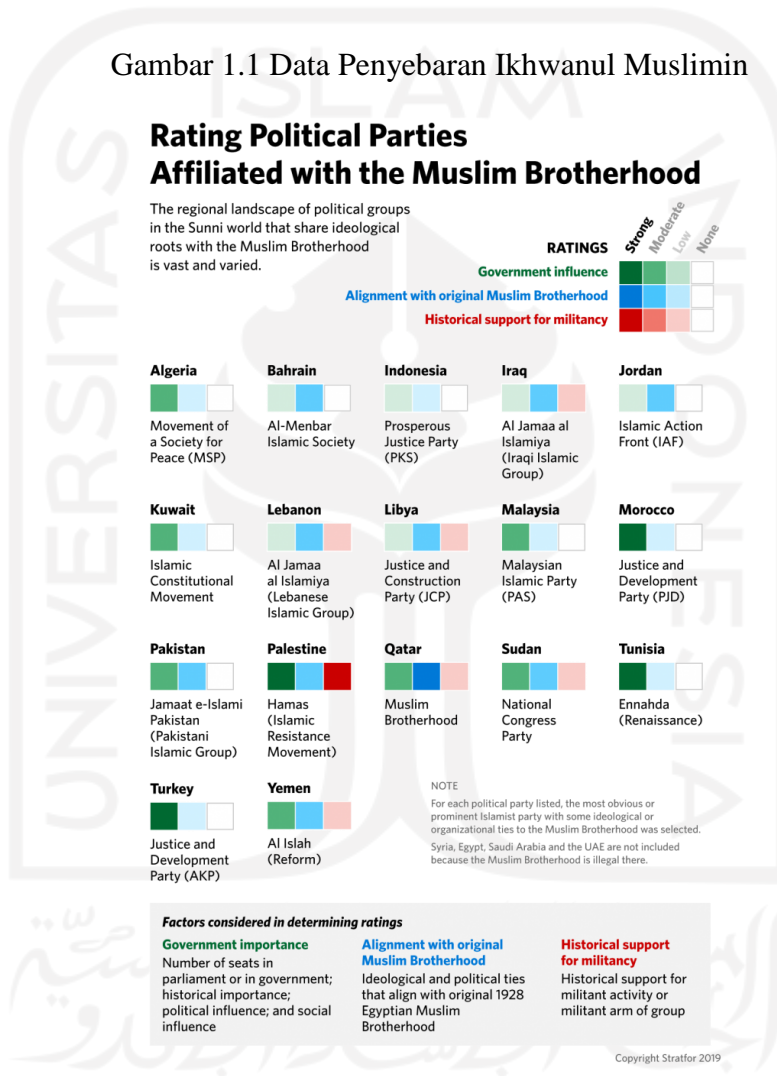
1.1 Latar Belakang

Pada masa demokrasi ini, partai politik dinarasikan sebagai kunci pembuka dari pintu demokrasi suatu negara, artinya partai politik sebagai organisasi masyarakat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Maka dari itu, keberadaan partai politik dibutuhkan sebagai jalan dalam pilar demokrasi dan manifestasi dari masyarakat (Labolo and Ilham 2015). Dalam dinamika politik Indonesia, Partai politik diketahui sebagai coordinator untuk calon dalam bersaing dalam pemilihan umum. Partai politik dibutuhkan sebagai bagian utama yang dapat melakukan penetrasi politik di Indonesia dengan kepentingannya lewat nilai ideologis atau kebijakan tertentu. Beberapa partai politik di Indonesia memperlihatkan bagaimana konstelasi politik yang diwakilkan dengan aktor lewat ideologisnya seperti Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai partai politik, PKS melakukan penetrasi ke dalam politik domestik Indonesia untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Sebagai partai yang bernafaskan Islam, PKS menarasikan partai politik adalah tempat untuk berdakwah di parlemen untuk memberikan pendidikan terhadap wakil rakyat (Rahmat 2008).

Berdirinya PKS sebagai partai Islam dapat dilihat dari dua faktor yakni internal dan eksternal, Faktor eksternal dari berdirinya PKS dapat dilihat dari gerakan transnasional Islam tertua di dunia yakni Ikhwanul Muslimin. Kontestasi Ikhwanul Muslimin sebagai Gerakan politik Islam dalam spektrum Hubungan Internasional dipahami sebagai Gerakan Politik Islam yang memiliki Hegemoni kuat di kawasan

Timur Tengah, ini dibuktikan dengan penyebarannya yang begitu kuat dan dapat diterima ke negara – negara di Timur Tengah dikarenakan adanya persamaan Ideologis dan tujuan dalam membangkitkan suatu semangat keagamaan Islam (Alexander and Dodge 2017).

Gambar 1.1 Data Penyebaran Ikhwanul Muslimin



Sumber: (Worldview 2019)

Data tersebut menunjukkan penyebaran Ikhwanul Muslimin di berbagai Negara di seluruh kawasan. Meskipun kekuatan politik dari Ikhwanul Muslimin masih belum

cukup kokoh, namun disamping itu cukup menunjukkan kontestasi hegemoninya dalam ide gerakan politik Islam. Secara spesifik dalam data tersebut dapat dilihat ada beberapa negara yang dikuasai Ikhwanul Muslimin secara inklusif. Data tersebut memperlihatkan Indonesia adalah salah satu negara yang ditempati oleh Ikhwanul Muslimin secara ideologi dan pemikiran, yang menjadikan beberapa substansi dari partai Islam ini mengambil sumber dari Ikhwanul Muslimin. Secara faktor eksternal, Ikhwanul Muslimin menjadi tonggak sejarah dari berdirinya Partai Keadilan Sejahtera karena ada beberapa kesamaan dari gagasan, ideologi dan kepentingan nasionalnya (Rinaldo 2013).

Melihat dari faktor internal, keadaan domestik PKS dilatarbelakangi oleh gerakan akar rumput mahasiswa yang telah dibangun bersama Jamaah Tarbiyah yang dipelopori oleh Ikhwanul Muslimin dari mahasiswa yang selesai studi di Mesir yang pulang ke Indonesia untuk mengaplikasikan pemahaman sewaktu berada di Mesir, para mahasiswa bergerak lewat kampus – kampus di Indonesia dan mulai memperluas hegemoni dengan mendirikan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang kemudian bertransformasi menjadi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di bawah pimpinan Fahri Hamzah untuk mendukung demonstrasi runtuhnya rezim presiden Soeharto. KAMMI bergerak sebagai jalan alternatif mahasiswa Muslim dengan basis Tarbiyah dengan tujuan mengambil kesempatan politik pada masa orde baru (Arrobi 2020).

Dalam kancah kepartaian kehadiran PKS dapat dikatakan sebagai “partai organik” (*organic party*), hal ini dikarenakan PKS sejenis partai yang berbasis pada

partai kader, berorientasi program, membangun hubungan intensif kepada masyarakat lewat pendidikan politik dengan visi ke depan, dan memiliki keberpihakan yang tegas kepada konstituen (Rahmat 2008). Artinya, PKS adalah partai yang sangat ideal dalam kancah politik Indonesia. Sesuai dengan visi PKS yakni “Menjadi Partai Islam rahmatan lil 'alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, maka dari itu PKS akan selalu menjadi partai Islam yang terdepan melayani rakyat. Tentu, hal ini menarik dibahas karena pada umumnya partai politik di Indonesia hanya mengedepankan keyakinan dan ideologi sebagai suatu alat untuk merealisasikan kepentingan dari partai politik agar mendapatkan kemenangan dalam pemilihan umum, bukan untuk kepentingan bangsa (Efriza 2019). Karena pragmatismenya partai di Indonesia, maka dari itu isu internasional umumnya tidak terlalu dicanangkan kepada masyarakat atau sebagai kepentingan partai. PKS mengambil posisi tersebut dengan menjadi partai yang cukup sadar akan isu internasional salah satunya adalah isu kemerdekaan Palestina yang menjadi isu kontemporer yang masih terjadi hingga saat ini. Beberapa aktor PKS selalu mengingatkan kepada kader dan masyarakat bahwasanya isu palestina adalah isu bersama yang harus diperjuangkan karena umat Islam yang sedang dijajah (Rahmat 2008). PKS memiliki perbedaan dengan Organisasi kemasyarakatan (ORMAS) seperti Nahdlatul Ulama (NU) dalam melihat isu Palestina. Hal yang menarik adalah ketika lawatan Katib Aam pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang kini menjadi ketua umum PBNU Yahya Cholil Staquf melakukan kunjungan ke negara Israel, kunjungan tersebut menjadi kecaman keras dikarenakan anggapan terhadap PBNU mulai mendorong normalisasi Indonesia dengan Israel, Gus Yahya dituai respon negatif

ketika bertemu dengan Benjamin Netanyahu selaku mantan perdana menteri Israel (Amin 2021). Meskipun tetap berkomitmen dengan kepentingan Indonesia yang memperhatikan Palestina untuk merdeka, namun kunjungan tersebut menjadi pembicaraan yang membuat stigma 'pro Israel'. Hal menjadi pembeda dengan PKS karena sebagai partai Islam PKS menyuarakan isu umat Islam dengan posisi yang akan selalu pro terhadap Palestina dan menjadi yang terdepan dalam mengawal isu Palestina.

Orientasi terhadap isu internasional dari PKS ini memperlihatkan bahwasanya narasi politik luar negeri Indonesia cukup sesuai dengan apa yang dilakukan dengan PKS. Pada tahun 2014, terpilihnya presiden Joko Widodo bersama wakilnya Jusuf Kalla membuat orientasi politik Indonesia mulai berubah. Perubahan ini dapat dilihat dengan tipe kebijakan pemimpin sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono dengan proaktif dan *outward-looking* dan Joko Widodo yang partisipatif dan *inward-looking* dengan garis batas dari prinsip politik luar negeri Indonesia yakni politik bebas aktif. Tipologi kebijakan ini berbanding jauh dimana SBY terlihat lebih *high profile* dan Jokowi yang lebih *low profile*, meskipun arah kebijakan presiden Jokowi lebih kepada penguatan domestik untuk melihat identitas keluar namun keterlibatan Indonesia dalam dunia internasional pernah sangat kuat diperlihatkan ketika menjadi Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada tahun 2018 hingga 2020. Presiden Jokowi dalam dua periode yakni 2014 dan 2019 tetap menerapkan tipologi kebijakan yang sama yakni *low profile* yang mengangkat isu kemerdekaan Palestina sebagai isu yang diberikan perhatian khusus (Kementerian Luar Negeri Indonesia 2019).

Melihat hal tersebut, PKS adalah partai politik yang cukup aktif dalam menyuarakan isu luar negeri terkhususkan Palestina dibanding dengan partai politik lainnya. Maka dari itu penulis ingin melihat lebih dalam sejauh mana Partai Keadilan Sejahtera memiliki pengaruh dalam dukungan Indonesia terhadap Isu Palestina.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul rasa keingintahuan penulis untuk menggali Mengapa PKS (Partai Keadilan Sejahtera) berpengaruh dalam dukungan Indonesia terhadap Palestina di era Jokowi?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengaruh PKS dalam dukungan Indonesia terhadap Palestina.
2. Mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi narasi PKS dalam dukungan Indonesia terhadap Palestina.

1.4 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian kali ini, penulis menganalisis kepada pengaruh PKS terhadap dukungan Palestina dalam kurun waktu dua periode presiden Jokowi yakni 2014 hingga 2019. Hal ini dilakukan dengan alasan arah kebijakan luar negeri Jokowi yang tetap sama yakni *inward-looking*. Sejak saat ini, isu kemerdekaan Palestina adalah isu kontemporer yang selalu dibahas oleh pemerintahan Jokowi dan PKS

sebagai partai Islam juga memperlihatkan sifat politiknya dengan keterlibatan bersama pemerintah dalam membantu isu tersebut.

Melihat dari hal tersebut, beberapa kebijakan PKS terhadap isu politik luar negeri cukup relevan dengan isu internasional yang terjadi. Dalam beberapa isu politik luar negeri, PKS sangat vokal dalam memberikan pandangan serta kepentingannya terhadap politik internasional pada masa kepemimpinan presiden Jokowi. Maka dari itu, penulis melihat bagaimana PKS memberikan pengaruh sebagai partai Islam serta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hal tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai penelitian ini berkaitan dengan posisi Partai Keadilan Sejahtera terhadap isu Politik Luar Negeri. Mengingat Posisi PKS adalah partai Islam yang akan selalu memperjuangkan kepentingan umat Islam lewat narasi politik luar negeri. Islam adalah sumber legitimasi dalam memposisikan suatu partai dalam kontestasi politik di Indonesia, maka dari itu. Islam menjadi salah satu entitas yang sangat penting dalam jalan Partai Keadilan Sejahtera merumuskan kepentingan dalam narasi politik luar negeri. Dinamika partai politik di Indonesia hanya terfokus kepada masalah domestik, sehingga hal tersebut menimbulkan pragmatisme terhadap situasi politik Indonesia, namun jika ditelusuri lebih jauh, PKS hadir sebagai partai organik yang memiliki sistem yang sistematis.

Namun penelitian mengenai pengaruh suatu partai politik terhadap isu hubungan internasional sudah banyak dilakukan dalam dua dekade terakhir.

Sebuah karya tulis ilmiah dari Ahmad Fuad Fanani yang berjudul “*SBY and The Place of Islam in Indonesian Foreign Policy*”. Karya tulis ilmiah ini merupakan sebuah tesis yang ditulis oleh Fanani, tesis tersebut menjelaskan bahwasanya terpilihnya SBY sebagai presiden Indonesia yang diselenggarakan lewat pemilihan umum membawa dampak bagi citra dan peran Indonesia di panggung internasional. Presiden SBY dianggap telah berhasil mengawal konsolidasi demokrasi Indonesia, hal tersebut ditandai dengan pandangan positif publik internasional terhadap Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar yang demokratis. Fanani menyimpulkan bahwasanya faktor Islam sangat signifikan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY (Fanani 2012). Dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh Fanani dapat melengkapi penelitian terkait faktor Islam dalam instrumen luar negeri, namun Fanani belum menjelaskan terkait pengaruh partai politik dalam keadaan politik luar negeri Indonesia. Disamping itu, penelitian yang dilakukan oleh Fanani mencakup pada masa pemerintahan SBY sehingga penelitian ini akan mencoba untuk memperbaharui penelitian sebelumnya.

Peran posisi Islam dalam politik luar negeri Jokowi dapat ditemukan dalam jurnal yang ditulis oleh Erianto yang berjudul “*The Position Of Islam In Foreign Policy During President Joko Widodo's Government (2014-2019)*” menyatakan bahwasanya pada masa pemerintahan Jokowi banyak kelompok yang semuanya membawa kepentingan Islam sebagai ideologi yang muncul ke permukaan, pengaruh tersebut diakibatkan karena kebebasan mulai diperlihatkan di era presiden Jokowi sehingga banyak kelompok kepentingan yang mulai menarasikan

Islam sebagai suatu solusi atas segala permasalahan yang ada. Lebih dari itu, para kelompok yang membawa ideologi Islam ini turut memiliki kepentingan untuk mempengaruhi kepentingan politik luar negeri Jokowi agar lebih ‘Islam’ (Erianto 2019), kelompok kepentingan tersebut diwakili oleh organisasi masyarakat yang mulai dari moderat hingga konservatif yang menggambarkan situasi posisi Islam sebagai jalan alternatif untuk menjelaskan situasi politik domestik hingga politik luar negeri (ibid). Penelitian yang dilakukan oleh Erianto sudah membangun argumennya dengan konstruktif, namun ada kekosongan dalam penjelasan peran organisasi masyarakat yang berbasis Islam dalam mengambil posisi hingga pengaruh dalam politik luar negeri pemerintahan Jokowi.

Islam memang sebagai suatu ideologi memanglah bukan hal yang baru, narasi agama dalam kontestasi pembuatan kebijakan memang sudah cukup lumrah dalam politik. Ini tertuang dalam tulisan Noorhaidi dalam buku : “Islam Indonesia 2020” menjelaskan bahwasanya politik Islam atau disebut juga Islamisme merupakan visi, wacana dan aksi yang berusaha menempatkan secara naratif agama Islam kedalam pusat kekuasaan dalam pemerintahan, mekanisme jalannya Islamisme yaitu dengan melibatkan para aktor penting dalam negara dan sekelompok individu yang bergerak atas dasar Islamisme. Islamisme harus jalan dengan ruang politik yang dilakukan oleh para aktor guna untuk mencapai kepentingan dari Islamisme tersebut, Islamisme juga harus ditegaskan bahwasanya Islam tidak sekedar agama, namun Islam adalah bagian dari seluruh aspek kehidupan seperti ideologi politik. Islamisme menegaskan bahwasanya masyarakat harus ditekankan untuk taat

kepada syari'ah, kembali kepada Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan praktik-praktik generasi awal muslim (*Salaf al-Salih*) (Hasan 2020, 9–11).

Dalam membedah Islam yang menjadi posisi PKS dalam isu politik luar negeri, penulis melihat bahwasanya posisi politik luar negeri PKS tentu memiliki banyak sekali faktor, faktor tersebut bisa berupa internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini penulis melihat bahwasanya faktor eksternal adalah bagian penting dalam preferensi PKS dalam pendirian, pergerakan, dan pencapaian kepentingan PKS. Salah satu yang menjadi bagian dari PKS adalah Ikhwanul Muslimin (disingkat IM). Mengacu kepada Jurnal yang ditulis oleh Titin Yuniartin yang berjudul : “Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera” mengatakan bahwasanya organisasi yang didirikan oleh Hasan Al-Banna menjadi model pembuatan PKS, yang dimana tujuan Islamisasi IM dilakukan secara gradual (*gradual Islamisation*), yaitu berawal dari individu ke dalam keluarga, ke dalam masyarakat, dan kemudian ke dalam politik (Surahman 2018). Tentu, hal ini menjadi banyak kesamaan yang dilakukan oleh PKS dalam agenda politiknya, PKS juga berkembang dengan membentuk gerakan dakwah (*the formation stage*) dan berakhir kepada *dauli* (*the government phase*) yang dimana aktor dakwah menduduki posisi parlemen. Tidak lupa, IM juga menyerukan untuk masyarakat kembali ke Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan dasar untuk membangun masyarakat Islami. Melihat asas perjuangan Ikhwanul Muslimin di Mesir, nilai – nilai tersebut dapat dianalisa yang menjadikan PKS sebagai partai Islam yang vokal dalam isu politik luar negeri, karena hal ini juga melihat dari Ikhwanul Muslimin yang cenderung bergerak lebih

soft seperti melalui isu kemanusiaan, pendidikan dan kesehatan, tidak *hard* seperti organisasi militan Islam.

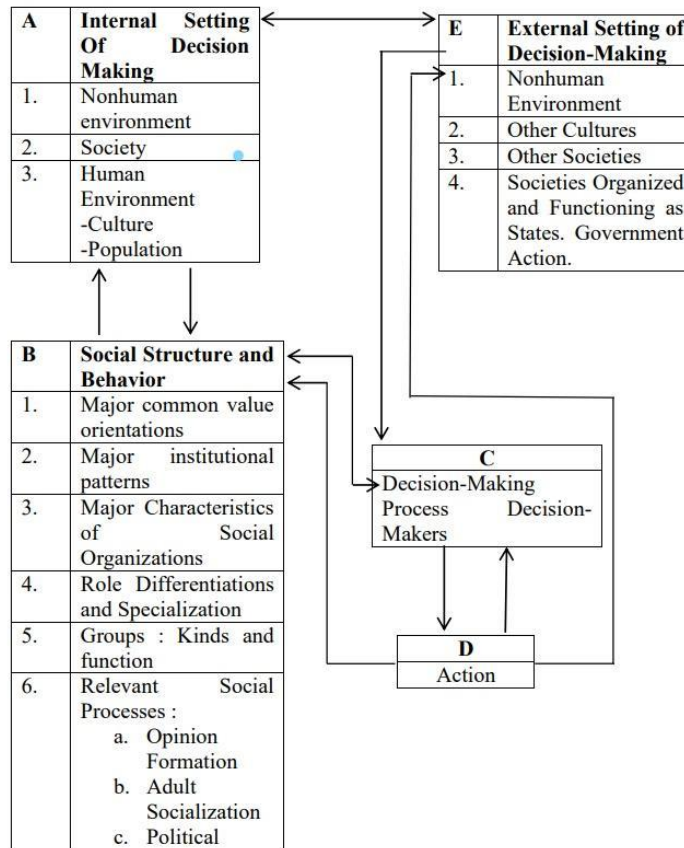
Penulis melihat bahwasanya pengaruh PKS dalam isu politik luar negeri memiliki kata kunci yang cukup relevan dalam konteks ilmu hubungan internasional seperti gerakan keagamaan kampus yang maju dalam politik. Konsep Islamisme dan perjuangan PKS dalam pengaruhnya terhadap dukungan Indonesia dalam kemerdekaan Palestina belum cukup terlihat, beberapa peneliti hanya menjelaskan tentang posisi Islam yang tidak dijelaskan secara rinci bagaimana organisasi dapat mempengaruhi suatu arah kebijakan luar negeri Indonesia, pragmatisme partai politik di Indonesia membuat belum adanya kesadaran terhadap isu internasional. Pada penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap dari beberapa literatur yang telah ada. Penulis ini difokuskan untuk membahas pengaruh Partai Keadilan Sejahtera dalam sebagai Partai Islam dalam dukungan Indonesia terhadap Palestina yang dilaksanakan pada era presiden Jokowi dengan menggunakan sudut pandang dari teori pembuatan kebijakan (*decision making*) yang sangat menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara melalui pembuatan kebijakan yang bersifat strategis dalam mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Dengan menggunakan sudut pandang teori *decision making* tersebut diharapkan negara mampu mengeluarkan berbagai kebijakan yang strategis dalam berupaya untuk menyelesaikan isu kemerdekaan terhadap Palestina.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori *decision making* atau yang dikenal dengan teori pembuatan kebijakan merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai perumusan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu pihak sebagai *decision makers* untuk merumuskan suatu implementasi yang memiliki urgensi dalam mengakomodasi kepentingan banyak pihak, termasuk didalamnya kepentingan masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah Menurut Richard Snyder dalam bukunya yang berjudul *Foreign Policy-Decision Making* menjelaskan definisi dari *decision making* yaitu suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengetahui perilaku pemerintah suatu negara di dalam tatanan hubungan internasional (Snyder, Bruck, and Sapin 2002, 85).

Umumnya, kebijakan dalam tatanan hubungan internasional sangat erat kaitannya terhadap suatu tindakan yang dikeluarkan oleh aktor pemerintah suatu negara dalam menyikapi berbagai konstelasi politik di negaranya yang mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah strategis untuk menyikapi hal tersebut. Snyder berpendapat bahwasanya pengambilan kebijakan setidaknya memiliki dua aspek utama yakni mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal dari negara tersebut (Snyder, Bruck, and Sapin 2002).

Diagram 1.1. *The Decision Making Model*



Sumber: (Snyder, Bruck, and Sapin 2002)

Snyder mengklasifikasikan faktor-faktor dalam sebuah pengambilan dan perumusan kebijakan yang dimana penelitian ini akan meninjau dari faktor internalnya.

Faktor internal, faktor ini menjelaskan bagaimana situasi dan perkembangan yang sedang terjadi di suatu wilayah negara yang tentunya hanya melibatkan pihak-pihak yang mendiami wilayah negara tersebut. Faktor internal tentunya melibatkan masyarakat yang mendiami wilayah tersebut dan pemerintah yang berwenang di negara tersebut. Ada banyak sekali faktor-faktor internal yang dapat menjadi pemicu bagi setiap aktor dalam merumuskan berbagai kebijakan

penting yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan domestik yang sedang terjadi. Contohnya adalah instabilitas politik domestik akibat adanya upaya kudeta, perang saudara, kejahatan kemanusiaan, pengaruh kelompok kepentingan terhadap politik. contoh lainnya dapat menjelaskan bagaimana suatu negara dihadapkan pada situasi krisis yang sangat mengancam stabilitas domestik di negara tersebut seperti krisis kesehatan, krisis akibat bencana alam, krisis pangan, dan masih banyak keadaan krisis yang dapat melatarbelakangi setiap aktor untuk dapat merumuskan berbagai kebijakan yang penting dan strategis bagi terciptanya keadaan domestik yang lebih terkendali (Snyder, Bruck, and Sapin 2002, 87).

Melihat dengan faktor internal yang disampaikan oleh Snyder dapat disimpulkan bahwasanya untuk menentukan suatu kebijakan yang dilakukan aktor dalam hubungan internasional harus memperhatikan keadaan dan kondisi terkini yang dapat dijadikan sebagai latar belakang bagi setiap aktor dalam perumusan suatu kebijakan. Untuk melihat hal tersebut penelitian mencoba untuk menghimpun beberapa sumber seperti kondisi dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernafaskan partai Islam, PKS lahir sebagai partai organik yang memiliki basis sistematis melalui kader-kader yang telah ditempatkan secara *underbow* dalam pemerintahan, arah pemerintahan Jokowi yang cukup konsisten memberikan dukungan terhadap Palestina.

1.7 Argumen Sementara

Setelah melakukan observasi menggunakan data-data yang relevan, penulis menemukan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan PKS berusaha untuk mempengaruhi dalam dukungan Indonesia terhadap Palestina. Faktor tersebut didasari dengan kerangka pemikiran yang menggunakan teori *decision making* dengan internal *setting* dari Snyder. Secara hipotesis, penulis melihat bahwasanya keberadaan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai Islam cukup aktif dalam menyuarakan umat Islam terkhususnya isu kemerdekaan terhadap Palestina. PKS dengan kegiatan politiknya memperlihatkan bagaimana dinamika yang sudah seharusnya dijalankan untuk mempengaruhi Indonesia dalam menyelesaikan Isu Palestina. meskipun PKS saat ini adalah partai oposisi di parlemen Indonesia, namun hal tersebut bukan suatu masalah karena isu Palestina adalah persoalan umat Islam yang ditinjau dari pandangan aktor PKS. Selain itu kebijakan luar negeri presiden Jokowi yang *inward-looking* membuat PKS dapat melakukan simplifikasi terhadap isu umat Islam yang sedang dijajah di Palestina, faktor tersebut dapat dilihat bagaimana kondisi politik domestik membuat Jokowi harus merumuskan kebijakan luar negeri terhadap Palestina.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menjabarkan proses penelitian ini secara bertahap, diawali dengan pembuatan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, hingga pada Analisa terakhir penulis menemukan kesimpulan dari pembahasan. Dalam ilmu sosial dan politik terkhususkannya untuk membahas fenomena ilmu hubungan

internasional. Penulis menggunakan metode kualitatif yang dipahami sebagai konsep yang menggunakan pendekatan ‘deskriptif’, artinya pendekatan ini dilakukan melalui kerangka tulisan ilmiah yang didukung oleh beberapa sumber data yang valid.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dan Objek dari penelitian ini dibagi menjadi dua hal. Penulis menempatkan Subjek sebagai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pemerintahan di era Jokowi, sedangkan Objek akan mengacu kepada pengaruh PKS sebagai partai Islam dalam dukungan Indonesia terhadap Palestina ditinjau dari perspektif *decision making*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan dari studi kepustakaan (*Library Research*) melalui pencarian sumber data tertulis. Sumber data ini meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan dan laporan yang disampaikan oleh organisasi yang akan dibahas dalam penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis sebelumnya merencanakan suatu penelitian yang dimulai dari suatu pertanyaan terhadap isu gerakan politik Islam yang kini sangat massif, dimulai dari isu tersebut penulis mulai mengumpulkan data; yaitu mencari sumber-sumber data sekunder dengan melihat kredibilitas dan validitas data dalam mendukung argumentasi dari penelitian ini. Penulis membaca,

melakukan *review* materi yang disampaikan dosen dalam mata kuliah Gagasan Politik Islam, hingga penulis mengumpulkan secara rinci data data tersebut yang menjadikan argumentasi yang memiliki landasan teori yang cukup kuat, setelah melakukan proses penelitian tersebut penulis menuangkan ke dalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian ini kedalam empat bab dalam menjelaskan rencana penulisan di setiap bab yang diteliti sebagai berikut.

- a. Bab 1, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, kajian pustaka, dan metodologi..
- b. Bab 2, bab ini membahas tentang latar belakang berdirinya PKS sebagai partai Islam, komunikasi politik PKS dalam isu internasional serta arah Indonesia dalam kebijakan isu Palestina. Bab ini menjadi pengantar terhadap pengaplikasian teori yang akan dijelaskan di bab 3. Pengatur tersebut diuraikan melalui dinamika antara PKS dan kebijakan Indonesia dalam dukungan Palestina.
- c. Bab 3, penulis melakukan pengaplikasian teori *decision making internal setting* dari Snyder terhadap studi kasus yang sudah direncanakan akan dibagi menjadi satu sub bab utama yaitu melalui faktor internal.
- d. Bab 4, bab ini membahas mengenai kesimpulan singkat, menjelaskan secara singkat mengenai pengaruh PKS sebagai partai Islam dalam politik luar negeri Indonesia dalam dukungan Indonesia di era Jokowi,

beserta akan merangkum dalam aplikasi teori dan memberikan rekomendasi agar dapat berguna pada penelitian di masa depan.



BAB 2

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI PARTAI ISLAM DALAM DUKUNGAN INDONESIA TERHADAP PALESTINA

Bab 1 sudah menjelaskan dan menguraikan mengenai latar belakang hingga metodologi yang menjadi dasar penelitian ini. Untuk melanjutkan pembahasan, penulis menggunakan bab 2 untuk menjelaskan konteks yang berguna untuk mengerti pembahasan di bab 3. Bab ini akan dibagi menjadi empat sub-bab. Pertama, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya PKS baik dari faktor internal dan eksternal. Kedua, penulis akan menjelaskan tentang gagasan dan kepentingan PKS di Indonesia. Ketiga, penulis akan menguraikan bagaimana aksi dalam isu Palestina yang dilakukan oleh PKS. Terakhir, penulis akan menjelaskan kebijakan Indonesia dalam isu Palestina dan pengaruh Indonesia dalam dunia internasional.

2.1 Proses pembentukan Partai Keadilan Sejahtera

2.1.1 Faktor Internal terbentuknya PKS

Kompleksnya dinamika Partai Keadilan Sejahtera hingga ada di posisi pemerintahan Indonesia tentu tidak terlepas dari latar belakang berdirinya PKS, dilain itu PKS bisa bertahan dari gempuran politik Indonesia juga karena memiliki gerakan akar rumput (*grassroot movement*) yang luar biasa. Pembentukan ini dimulai pada masa akhir Orde Baru karena perlu diketahui masa presiden Soeharto adalah masa dimana pemerintah sangat alergi dengan gerakan Islam Politik. Alergi tersebut disebutkan oleh Burhanuddin Muhtadi lewat bukunya yang berjudul *Dilema PKS:*

Suara dan Syariah, Soeharto menganggap posisi politik Islam pada orde baru dapat mengancam stabilitas politik di Indonesia dikarenakan basis massa yang cukup kuat (Muhtadi 2013). Karena kerasnya sentimen terhadap politik Islam pada masa itu maka basis gerakan dakwah kampus mengganti namanya dengan Tarbiyah agar dapat menjaga jarak dengan beberapa kelompok yang bersifat politis (Muhtadi 2013).

Kehidupan dakwah yang bernama “Jamaah Tarbiyah” ini semakin berkembang dengan mendirikan Lembaga Dakwah Kampus agar lebih kolektif dan dapat penetrasi di berbagai kampus seluler di Indonesia seperti di UGM, UI, ITB dan IPB (Hanifa 2014), kemudian LDK mulai bertransformasi dengan mendirikan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Indonesia (FSLDK) pada tahun 1986, bertepatan dengan mulai berakhirnya rezim orde baru dan pertemuan ke-10 FSLDK di Malang pada 1998 para mahasiswa sepakat untuk mendeklarasikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Universitas Muhammadiyah Malang yang akan dipimpin oleh Fahri Hamzah untuk pertama kalinya (Kraince 2000)

Sejalan dengan berakhirnya rezim orde baru dan menggesernya dengan era reformasi, tentu roda demokrasi Indonesia dijalankan kembali dan dengan ini sejumlah tokoh KAMMI beranggapan untuk diharuskannya mendirikan suatu Partai Islam yang berasaskan nilai ideologisnya (Muhtadi 2013). Maka dari itu diberikan suatu keputusan untuk membentuk suatu partai bernama Partai Keadilan (PK) pada 20 Juli 1998 yang dipimpin oleh Didin Hafidhuddin sebagai presiden pertamanya dan Partai Keadilan didirikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Namun, dikarenakan kebijakan pemerintah terkait partai dengan *electoral threshold* PK hanya 2% maka PK

harus bertransformasi dengan nama baru yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 20 April 2003 (Machmudi 2008). Partai Keadilan Sejahtera lahir sebagai jalan panjang dari Lembaga Dakwah Kampus, kemudian bertransformasi menjadi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan mendirikan Partai Keadilan. Namun Burhanuddin dalam bukunya menjelaskan bahwasanya tidak ada hubungan secara struktural antara KAMMI dan PKS, namun dengan aktivis KAMMI yang masuk kedalam politik dapat dianggap berkontribusi dalam sistem demokrasi Indonesia dan mendapatkan kepentingan besar dalam memajukan gerakan dakwah mereka. Hubungan antara KAMMI dan PKS dapat diakui sebagai hubungan ideologi, budaya, dan sosial. Meskipun relasi antara KAMMI dan PKS tidak formal, fakta empirisnya adalah adanya ikatan antara PKS dan KAMMI yang sangat kasat mata, bahkan Burhanuddin mengatakan KAMMI dianggap sebagai sayap mahasiswa PKS dan alumni KAMMI memegang posisi kunci dalam struktur partai dan cabang (Muhtadi 2013). Seiring dengan berkembangnya catur politik Indonesia, PKS juga berhasil menempatkan kader politiknya menjadi gubernur, bupati dan Walikota di beberapa provinsi dan daerah di Indonesia. Eskalasi politik PKS yang kuat juga didasari oleh sistem kaderisasi yang sistematis dan teratur, PKS juga berhasil mengelola militansi kadernya dalam akar rumput hingga gerakan mahasiswanya lewat KAMMI (ibid).

2.1.2 Faktor Eksternal terbentuknya PKS

Tidak hanya faktor internal, faktor eksternal juga cukup mempengaruhi dalam proses pembentukan PKS. Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi transnasional menjadi tonggak dalam berdirinya Partai Keadilan Sejahtera. Ikhwanul Muslimin

menjadi metode dari acuan utama bagi PKS dalam melakukan gerakan politiknya baik secara ideologi, politik, manhaj dakwah hingga pemahaman keislamannya. Maka dari itu banyak kader PKS yang menyebut diri mereka sebagai kader Ikhwanul Muslimin (Rahmat 2008). Pola IM sebagai anak ideologis dari Partai Keadilan Sejahtera dapat dilihat dari cara gerakan akar rumputnya yakni sistem dakwah yang berdasarkan *usrah*, *halaqah* dan Tarbiyah yang mengadopsi nilai dari Ikhwanul Muslimin (Furkon 2004). sama dengan IM, PKS juga memaknai konsep Islam sebagai ideologi juga harus universal, artinya Islam merupakan kacamata untuk memahami realitas politik dalam strategi perjuangan politik, hal ini mengartikan bahwasanya Islam mengajarkan seluruh aspek kehidupan dan perjuangan tersebut akan terus dilakukan (ibid).

Meskipun PKS dan Ikhwanul Muslimin tidak memiliki hubungan secara struktural dan formal, namun hal ini dapat dilihat bagaimana gerakan politik Islam IM ini memiliki kesamaan dengan isu yang diangkat seperti kemerdekaan Palestina. PKS dan IM juga diperlihatkan memiliki kesamaan prinsip yakni memandang Islam adalah solusi (*Al Islam Huwal Hal*) (Widyarsa 2011). Ikhwanul Muslimin memaknai Islam sebagai suatu Agama yang tidak hanya terdiri dari Shalat, Zakat, Puasa dan Haji. Ikhwanul Muslimin memaknai Islam dengan terminologi yang sangat luas dan universal yakni dengan subversi Islam dengan lebih politis namun memiliki jalan dari *grassroot* seperti membangun sosok individu yang Muslim, Rumah Tangga Islami, Bangsa yang Islami, Pemerintah yang Islami dan hingga membentuk suatu negara yang memiliki asas *syariah* Islam sesuai Al-Qur'an (Ulfah 2016).

2.2 Gagasan dan Kepentingan PKS di Indonesia

Karena PKS mengambil sel dari Ikhwanul Muslimin, maka dari itu ideologi PKS adalah Konservatisme Islam berdasarkan sosial serta posisi kompas politik PKS dalam catur politik Indonesia adalah sayap kanan agama yang bertujuan untuk melawan pemikiran moderat, progresif dan sayap kiri dan sebagai usaha untuk mempertahankan idealisme suatu ideologi (Hamayotsu 2015). Partai Keadilan Sejahtera menawarkan gagasan yang ditujukan untuk kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. PKS menerapkan pemikiran Islam yang dituang dalam konsep politiknya yakni mencoba untuk purifikasi Islam kembali sesuai yang sudah ada. Sebagai partai Islam yang memiliki hubungan kuat dengan Ikhwanul Muslimin, PKS cukup kritis dengan tradisi lokal yang ada di Indonesia seperti tahlil, talqin, barzanji, mauludan, selamatan, dan ziarah kubur. Hal tersebut menjadi alasan tersendiri dikarenakan kader PKS tumbuh dari kalangan Tarbiyah yang memiliki semangat purifikasi *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat*. Karena beberapa alasan tersebut maka PKS adalah genre baru di Indonesia (Rahmat 2008, 180), ideologi tarbiyah yang ada di PKS membuat partai ini adalah partai dakwah yang akan melaksanakan kepentingannya sebagai partai politik di Indonesia.

Sebagai partai politik, Partai Keadilan Sejahtera tidak hanya turun dengan persoalan politik yang dikenal dengan menjadi wakil rakyat, namun lebih dari itu. PKS memiliki kepentingan di Indonesia dengan memperjuangkan Islam sebagai solusi dan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengarahkan nilai ajaran Islam sebagai

kekuatan transformatif dalam proses membangun umat dan bangsa (Basyir 2014). Masuknya kader Partai Keadilan Sejahtera dalam politik Indonesia memiliki misi khusus yakni mempraktikkan gaya hidup salih dengan ketaatan dalam beribadah, kesantunan akhlak, serta menjauhi kemaksiatan yang lekat dengan kemewahan duniawi seorang manusia. Misi islam ini dibawa oleh PKS yang sesuai dengan visi misi politiknya yang mewujudkan masyarakat madani dan merealisasikan *Ukhuwah Islamiyyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwah Basyariyyah*. Misi tersebut dilakukan oleh kader PKS yang mayoritasnya adalah jamaah Tarbiyah yang kemudian memutuskan untuk berpolitik dan menamainya dengan aktivis dakwah parlemen.

2.3 PKS dalam isu Palestina

Palestina adalah isu yang sangat sentral bagi Partai Keadilan Sejahtera. Setiap konflik yang ada di Palestina PKS memiliki tanggung jawab untuk mengangkat masalah tersebut ke publik dan membantu dalam menyelesaikannya. Pembebasan Palestina adalah kepentingan nasional dari PKS sejak partai ini mendapat panggung politik di Indonesia. PKS seringkali memperhatikan presiden Jokowi terkait kinerja dalam isu kemerdekaan Palestina, narasi Jokowi dan pernyataan dalam pembelaan Palestina kerap diapresiasi oleh elit Partai karena membela Palestina dengan lebih progresif dibanding negara lain (DPP Partai Keadilan Sejahtera 2016).

Sebagai partai Islam, PKS melakukan penetrasi dengan melakukan advokasi politik terhadap masyarakat Indonesia yang tujuannya untuk memperlihatkan isu internasional Palestina yang dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Pernyataan pers
- b. Lobi dengan pemerintah pusat
- c. aktivitas parlemen
- d. diplomasi dengan negara dominan
- e. mobilisasi massa dan demonstrasi

PKS pernah melakukan donasi dengan aksi *one man one dollar* yang dimana aksi tersebut dapat mengumpulkan enam miliar yang diberikan untuk perjuangan Palestina (Rahmat 2008). PKS juga mengirimkan surat protes pada eskalasi konflik Palestina yakni ketika presiden Donald Trump memindahkan kantor kedutaan besar ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel (RMOL 2017), serta memberikan protes terhadap presiden Amerika yang sekarang yakni Joe Biden yang dimana PKS menyatakan sikap menyayangkan keputusan AS dalam konflik Palestina-Israel yang memanas dalam beberapa waktu terakhir. Keputusan Pemerintah AS yang ditentang dan disayangkan PKS, terkait sikap pemerintah AS yang secara sepihak membela tindakan Israel dengan melakukan hak veto di Dewan Keamanan PBB (Iswinarno and Ardiansyah 2021). PKS juga beberapa kali melakukan aksi bela Palestina dengan mobilisasi massa di depan kantor kedutaan besar Amerika Serikat bersama kadernya. Ketua badan pembinaan dan pengembangan pengembangan luar negeri DPP PKS Sukamta menyatakan "Kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Namun kita ingin Pemerintah Indonesia berbuat lebih banyak, lebih progresif, lebih baik, agar bangsa Palestina segera menuju kemerdekaannya," . Tidak hanya itu, Sukamta juga menambahkan "Kita PKS

memberikan dukungan penuh. Oleh karena itu kita meminta kepada pemerintah, jangan ragu-ragu untuk mendukung Palestina menuju merdeka," (DPP Partai Keadilan Sejahtera 2021).

Tidak hanya sampai disitu, PKS bersama elite dan kader juga melakukan orasi dan menyanyikan lagu yang memiliki penggalan "Tak pernah mengubah janji Ar Rahman terlaknat Yahudi tiada ampunan, tumpas zionis bebaskan negeri Palestina" (CNN Indonesia 2021). Ahmad Syaikhu selaku presiden PKS juga membuat *press release* ketika konflik pengusiran empat keluarga Palestina dari rumah mereka di Sheikh Jarrah, Ahmad Syaikhu menyatakan bahwasanya pengusiran ini bukanlah kebijakan parsial yang berdiri sendiri merupakan bagian yang integral dari tindakan rezim Zionis Israel terhadap rakyat Palestina yang bertentangan dengan norma, hak asasi manusia dan hukum internasional (Kompas 2021). Hal yang paling menunjukkan posisi PKS sebagai partai Islam dalam politik internasional ketika PKS menyerukan umat Islam untuk menyertakan doa Qunut Nazilah, anggota DPR RI komisi VIII yakni K.H Buchori Yusuf menyatakan "Mencermati perkembangan terbaru di Palestina, saya mendorong umat muslim Indonesia untuk membaca *Qunut Nazilah* dalam shalat fardhu, misalnya dalam shalat subuh dan shalat witr selama ramadhan. Sebab doa adalah senjata orang mukmin. Dan untuk saat ini, hal itu adalah salah satu pilihan rasional yang bisa dilakukan untuk membantu kaum muslimin di sana," (Humas Fraksi PKS 2021).

2.4 Kebijakan Indonesia dalam dukungan Palestina di era Jokowi

Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, sudah seharusnya Indonesia bisa mengimplementasikan nilai esensi dari ‘bebas aktif’ tersebut, Indonesia harus bisa bebas dalam konstelasi politik internasional dan memiliki panggung besar. Artinya Indonesia ikut goncangan geopolitik internasional namun dengan kepentingan nasionalnya yakni menjadi jembatan perdamaian internasional dan aktif dalam menyuarakan isu internasional. Prinsip bebas aktif Indonesia ini dibuktikannya dengan berdirinya *non-alignment movement* atau gerakan non blok dan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi Konferensi Asia-Afrika. Indonesia memang telah melangsungkan dukungan Palestina sejak zaman Soekarno dan hal tersebut tetap diwariskan hingga masa pemerintahan era Jokowi (Mukthi 2014).

Melihat dari sumber Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Indonesia menaruh posisi umumnya yang dibagi dalam enam kategori yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mendukung langkah-langkah Palestina dalam mewujudkan kemerdekaan.
- b. Mengembalikan sentralitas isu Palestina di dunia internasional di tengah konflik yang terjadi di negara Timur Tengah saat ini.
- c. Mendorong pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara anggota PBB dan organisasi internasional.

- d. Mendukung inisiatif negara-negara dan PBB guna menghidupkan kembali perundingan damai Palestina-Israel berdasarkan “solusi dua negara” (*two state solutions*).
- e. Menggalang negara-negara OKI menemukan solusi damai penyelesaian masalah Palestina – Israel.
- f. Terus mengupayakan agar Palestina, terutama kompleks Al Aqsa, ditempatkan dalam Perlindungan Internasional (*International Protection*) (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2019).

Dalam dua kesempatan besar, Indonesia sempat menduduki sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada tahun 2018 hingga 2020, kesempatan tersebut dimanfaatkan sebagai akselerasi kebijakan pemerintahan Jokowi dengan menaruh perhatian khusus pada isu Palestina dengan memegang *penholdership* (tanggung jawab untuk penyusunan dokumen sidang DK PBB, seperti rancangan resolusi, press statement) untuk sejumlah isu yang salah satunya isu Palestina (Kementerian Luar Negeri Indonesia 2019). Dua periode kepemimpinan Jokowi memperlihatkan bagaimana konsistensi terhadap isu Palestina yang didukung bersama para aktor internasional yang menarasikan isu perdamaian terhadap kedua negara tersebut (Hardianto 2021).

BAB 3

PENGARUH PKS (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) SEBAGAI PARTAI ISLAM DALAM DUKUNGAN INDONESIA TERHADAP PALESTINA DI ERA JOKOWI DITINJAU DARI *DECISION MAKING*

Bab 2 sudah menjelaskan mengenai dinamika PKS dari proses terbentuknya hingga bagaimana kebijakan Indonesia dalam mendukung Palestina secara komprehensif dan menghasilkan narasi PKS yang konsisten untuk menyuarakan umat Islam yang sedang dijajah oleh Palestina. Maka dari itu, untuk melanjutkan penelitian ini, bab 3 akan menjelaskan faktor yang membuat Partai Keadilan Sejahtera memiliki pengaruh dalam dukungan Indonesia terhadap Palestina. Namun untuk menganalisis bab ketiga ini penulis menggunakan teori *decision making* dari Richard C. Snyder (lihat bab 1).

Snyder menyatakan ada kelima faktor yang menjelaskan dalam aktor hubungan internasional dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri. Namun untuk penelitian ini penulis memfokuskan pada faktor internal dikarenakan beberapa aspek dari politik domestik tersebut membuat aktor harus dapat merumuskan kebijakan yang mewakili kepentingan masyarakat di wilayahnya.

Penelitian ini menelaah lebih dalam bagaimana Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai Islam dapat melakukan penetrasi sehingga memberikan pengaruh kepada

Indonesia dalam dukungan Palestina pada era Jokowi. Maka dari itu pembahasan pada bab 3 akan melakukan aplikasi teori *decision making* terkhususnya *internal setting* yang dijelaskan oleh Snyder.

3.1 Aplikasi Teori

Tabel 1. Aplikasi Teori *Decision Making Model (Internal Setting)*

A	INTERNAL SETTING OF DECISION-MAKING	
	1	Iklm politik domestik Indonesia
	2	Populasi Indonesia yang mayoritasnya Muslim
	3	Kultur PKS yang bernafaskan Islam

Tabel 2. Aplikasi Teori

Variabel Teori	Analisis/Aplikasi
<i>Faktor internal (Internal Setting of Decision-Making)</i>	<i>a. Non-human environment:</i> Iklm Politik domestik Indonesia pada era Jokowi yang memiliki kecenderungan terhadap politik identitas umumnya partai politik menggunakan identitas.

	<p>b. Society: Populasi masyarakat di Indonesia yang mayoritasnya adalah umat Muslim.</p>
	<p>c. Human Environment (Culture, Population): Kultur Partai Keadilan Sejahtera yang bernafaskan Islam dan para kadernya yang rata-rata adalah alumni dari gerakan Jamaah Tarbiyah dan KAMMI.</p>

3.2 Analisis studi kasus lewat faktor internal

3.2.1 Non-Human Environment

Pada masa ini, iklim politik di Indonesia cenderung lebih mengarah kepada politik Identitas dengan mengangkat isu etnis dan agama. Hal ini dipercepat dengan kondisi Indonesia yang kaya akan keragaman dari suku, agama, ras dan budaya. Hal tersebut membuat arah pemerintah Indonesia mengalami restrukturisasi dengan selalu mengangkat isu agama (Populis 2022). Iklim politik yang berubah tersebut menjadi alasan dari presiden Jokowi yang merubah arah kebijakannya menjadi *inward-looking*. Kebijakan tersebut membuat Indonesia melihat lebih dalam kepada kondisi politik domestiknya sebelum menarasikan politik luar negerinya (Situmorang 2015).

Hal ini cukup memperlihatkan bagaimana Partai Keadilan Sejahtera mengambil tempat sebagai *non state actor* untuk terlibat lebih dalam konstelasi politik di era Jokowi. Lebih dari itu, agama Islam telah menjadi instrumen dalam narasi politik luar

negeri Indonesia. Jokowi sebagai formula kepala negara melihat kondisi domestik negara serta kebutuhannya dan berkoordinasi dengan kementerian luar negeri Indonesia dalam merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia. Konsep politik bebas aktif Indonesia membawa tantangan terhadap diplomasi yang bersifat moderasi agama, dalam hal ini Indonesia tidak hanya berkuat dengan isu-isu nasional yang berlandaskan kepentingan nasional, namun aspek irasional yang dinamakan agama juga turut ada dalam faktor kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam hal ini, konsep politik luar negeri Indonesia diusung lewat ideologi Pancasila tentu dapat menjadi dualisme karena pemerintah harus berkuat dengan Pancasila disamping nilai keislaman dalam narasi politik luar negeri (Robby 2020). Namun hal ini bukan suatu masalah meskipun orientasi Indonesia tetap bebas aktif akan tetapi faktor Islam dapat fleksibel dalam konteks apapun. Akan tetapi, presiden Jokowi juga sadar bahwasanya Islam dapat menjadi faktor utama dalam kepentingan nasional yang berlanjut jadi kepentingan internasional.

Sebagai partai organik, PKS dengan basis kader Tarbiyah yang sistematis membuat kepentingan kelompoknya selalu akan menyampaikan. Beberapa aktor PKS mendorong agar pemerintah lebih aktif dengan bantuan terhadap Palestina. Ahmad Syaikhu selaku presiden PKS menyatakan ingin melakukan audiensi dengan Kementerian Luar Negeri agar Indonesia bisa lebih konsisten terhadap isu Palestina. Dalam pernyataan Syaikhu menyebutkan bagaimana Indonesia adalah tumpuan terhadap isu perjuangan Palestina yang dicatat sebagai berikut:

"Karena tumpuan dunia adalah Indonesia, salah satunya sebagai mayoritas muslim yang harus mengambil sikap yang tegas. Harus berani menjadi leader dalam percaturan politik dunia, Kita berharap Pak Jokowi juga tampil sebagai negarawan dalam kancah internasional," (Wakik 2021).

Dalam aspek lain, PKS juga memberikan apresiasi terhadap Jokowi pada sidang umum PBB yang menarasikan terkait dukungan Indonesia terhadap Palestina yang dinyatakan sebagai berikut:

"Terima kasih kepada Presiden Jokowi yang terus konsisten dan berusaha mewujudkan cita-cita pendiri Bangsa Indonesia untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi. Presiden Jokowi juga telah membawa harapan kaum muslimin Indonesia agar Palestina bisa merdeka," (JPNN 2020).

Faktor lingkungan tersebut menjadi alasan kenapa presiden Jokowi tetap memberikan perhatian khusus terhadap isu Palestina, karena dorongan dari kelompok identitas yang selalu membawa etnis dan agama yang akan menjadi perhitungan bagi presiden Jokowi apabila tidak melaksanakannya tentu akan berpengaruh terhadap kebijakan atau stabilitas politik domestiknya. PKS hadir sebagai partai politik dan organisasi yang dapat mengkoordinir kepentingan umat Islam di Indonesia untuk menyuarakan isu kemerdekaan terhadap Palestina.

3.2.2. Society

Dinamika ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Jokowi, sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar

ketiga di dunia (Kusnandar 2021; Ilham 2011). Presiden Jokowi tentu harus dapat mengakomodir semua kepentingan umat Islam yang ada di Indonesia, maka dari itu, presiden Jokowi diharuskan untuk mengambil kebijakan luar negeri yang simplifikatif dalam mendukung Palestina, hal tersebut dikarenakan mayoritas populasi di Indonesia adalah umat muslim maka dari itu sebuah tanggung jawab moral bagi presiden Jokowi untuk mendukung Palestina. Dalam hal ini, PKS adalah partai yang memiliki kepentingan untuk menyuarakan umat Islam. PKS secara normatif mengajak umat Islam di Indonesia untuk memberikan dukungan empati terhadap Palestina dengan membawa ‘umat Islam sedang didera’, Salah satu pernyataan dari anggota DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan konstitusi Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan ‘kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa’ yang juga mengucapkan:

“Sebagai sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mendukung upaya kemerdekaan Negara palestina. Karena Penjajahan yang ada di muka bumi ini selayaknya harus dihapuskan dimanapun berada,” (Humas Fraksi PKS 2021).

Disamping itu, PKS juga membawa kelompoknya untuk melakukan aksi bela Islam (baca: demonstrasi) sebagai bukti akan selalu konsisten dan mendukung Palestina. Artinya adalah situasi domestik yang dialokasikan oleh PKS untuk memberikan dorongan terhadap dukungan Palestina diperlihatkan oleh presiden Jokowi sebagai kepala negara dengan mendukung Palestina secara konsisten.

3.2.3 Human Environment (Culture, Population)

Pembahasan ini akan mengacu kepada lingkungan negara Indonesia yang dipimpin oleh presiden Jokowi yang menjadi alasan terhadap dukungan Palestina. Dalam situasi ini, Jokowi sadar bahwasanya Indonesia masuk kepada masa dimana agama merupakan faktor penting dalam menarik suatu popularitas aktor, beberapa lembaga agama mulai memiliki peran krusial dan tokoh agama mulai memiliki legitimasi yang bersifat politis, bahkan tokoh tersebut dapat bertransformasi menjadi politisi. Artinya adalah Indonesia memasuki masa dimana negara yang tidak menganut sistem yang sekuler namun tidak juga secara agama (Makin 2022). Karena situasi tersebut tentu dalam perumusan arah kebijakan luar negeri terhadap Palestina, presiden Jokowi melihat situasi domestik dengan opini publik yang akan selalu mengarah kepada dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Maka dari itu, banyak aktor dari Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi aktor sentral dalam narasi terhadap dukungan kepada Palestina seperti presiden PKS yakni Ahmad Syaikh.

Sesuai dengan AD/ART dan arah ideologis PKS yakni partai yang berasaskan Islamisme, PKS aktif mendorong dan membantu pemerintah dalam peran konstelasi politik internasional seperti melakukan pernyataan pers, lobi dengan pemerintah pusat, aktivitas parlemen, diplomasi dengan negara negara dominan, mobilisasi massa dan melakukan demonstrasi PKS membawa kultur dari berdirinya PKS yang memiliki basis kader dari umat Islam yang berhaluan konservatif. Situasi ini memperlihatkan bahwasanya PKS bersama kadernya membawa isu Palestina dengan sangat keras hingga sering disalahpahami sebagai anti-semit (anti Yahudi). Sebagai partai politik

PKS merupakan pihak yang paling keras terhadap isu palestina dan landasan tersebut menjelaskan bagaimana kultur agama yang kuat dan populasi muslim terbesar membuat PKS menjadi salah satu organ yang dapat mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam dukungannya terhadap Palestina (Rahmat 2008).

3.3 Pengaruh PKS dalam dukungan Indonesia

Setelah melihat aplikasi teori diatas, dapat dianalisis bahwasanya PKS berpengaruh dalam perumusan pemerintah Indonesia dalam dukungannya terhadap Palestina di era Jokowi, hal ini disebabkan apabila pemerintah Indonesia tidak menunjukkan eksistensinya terhadap isu Palestina maka dikhawatirkan akan menjadi permasalahan terhadap instabilitas politik domestik di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara umat Muslim terbesar dan situasi wilayah Indonesia yang sedang memasuki masa politik identitas khususnya etnis dan agama (Anam 2019). partai politik seperti PKS menjadi kelompok berkepentingan dengan tujuan untuk menyuarakan isu Palestina sebagai isu utama dalam perjuangan umat Islam.

Sebagai negara dengan prinsip politik bebas aktif, Indonesia tidak hanya sebagai aktor tunggal dalam melaksanakan kebijakan namun semua elemen dapat melaksanakannya, hal ini tertuang pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan “*Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia*” (BPK n.d.). Artinya, aspek hubungan luar negeri juga dapat dilakukan oleh *non-state*

actor yang dimana Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membantu pemerintah dalam kepentingan nasionalnya.

PKS sebagai partai politik yang bernafaskan Islam tentu memanfaatkan kesempatan tersebut, artinya PKS menjadi *non state actor* yang akan membantu pemerintah Indonesia dalam mendukung isu Palestina dalam berbagai narasi yang ada. Dinamika yang terjadi di tubuh PKS membuat partai tersebut mengelola narasi Islamisme seperti isu Palestina yang umat Muslim sedang dijajah, PKS melakukan caranya seperti berdemo, mengirimkan surat protes atau penegasan, melakukan boikot, mendoakan dengan *qunut nazilah* serta mendorong pemerintah untuk lebih tegas dengan isu umat Muslim dengan melakukan diplomasi dengan organisasi internasional ataupun negara dengan kekuatan politik besar untuk cepat menyelesaikan konflik tersebut. PKS melakukan kontemplasi dalam menyuarakan isu internasional yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia. Tarik menarik tersebut membuat pemerintah sadar akan tekanan domestik yang jika ditinjau dari perspektif Snyder hal ini menjadi alasan dari faktor internal dalam perumusan suatu kebijakan.

Sebuah survei publik yang dilakukan oleh saifulmunjani menyatakan bahwasanya publik melihat Palestina adalah negara yang dijajah dan Israel sepenuhnya salah, survey juga menunjukkan konflik Israel dan Palestina adalah pertentangan antara Yahudi dan Islam dan publik juga menyatakan sebesar 41% bahwasanya negara Israel tidak boleh diakui karena berdiri diatas tanah Palestina (Saifulmunjani 2021). Hal yang menarik adalah bagaimana opini publik yang dibangun untuk melihat isu Palestina dan Israel adalah isu agama dan PKS menjadi pihak yang mendorong dan membantu

pemerintah Indonesia dalam penyelesaian isu konflik Palestina dan Israel. Tentu, kebijakan presiden Jokowi yang *inward-looking* memperlihatkan bahwasanya situasi politik domestik Indonesia dapat mempengaruhi terhadap tekanan yang akan menjadi arah politik luar negerinya (Situmorang 2015). Dari hal tersebut, dapat dianalisis bahwasanya pengaruh Partai Keadilan Sejahtera terhadap dukungan Indonesia terhadap Palestina memang dapat dibenarkan, analisis dari faktor internal yang dijelaskan dari Snyder dapat dinyatakan bahwasanya pemerintah Jokowi melihat kedalam sebagai perumusan kebijakan luar negerinya, melihat kedalam ini artinya bagaimana PKS sebagai partai Islam yang membawa ciri khasnya dalam mendukung Palestina dan narasi tersebut dapat diasosiasikan sebagai acuan dalam pengaruh PKS dalam isu internasional. Advokasi politik yang dilakukan PKS seperti pernyataan pers, aktivitas parlemen dan mobilisasi massa adalah bentuk dari keterlibatan PKS dalam isu Palestina. Aktor di PKS membawa isu agama sebagai landasan utama dalam menarasikan isu tersebut dan membangun opini publik agar memperlihatkan citra partai sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya.

Berdirinya PKS sebagai partai Islam tentu memiliki tujuan yakni untuk mewakili kepentingan umat Islam yang dimana faktor tersebut dapat dilihat bagaimana para kader dari Jamaah Tarbiyah yang melakukan kontemplasi untuk memperlihatkan isu umat Islam dan faktor eksternal yakni Ikhwanul Muslimin yang juga bergerak dengan isu yang sama (Rahmat 2008). IM juga menjadi aktor utama dari penyelesaian dari eskalasi konflik di Palestina lewat gerakan organisasi militan yakni Hamas, IM memberikan kontribusi sosial yang sesuai dengan narasi dakwahnya yakni dengan

membangun sekolah, klinik dan rumah sakit untuk membantu rakyat Palestina (Levitt 2006).



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini berupaya untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pengaruh Partai Keadilan Sejahtera dalam dukungan Indonesia terhadap Palestina di era presiden Jokowi. Melalui teori *decision making* oleh Richard Snyder, riset ini telah menguraikan sejumlah faktor yang mendorong dirumuskannya kebijakan dalam upaya menyelesaikan isu Palestina yang sedang terjadi.

Sebagai pemangku kepentingan dan *decision maker*, Pemerintah Jokowi berupaya untuk tetap konsisten dalam mendukung isu Palestina, hal tersebut juga tertuang dalam posisi Indonesia di politik internasional dan ketika Indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap isu Palestina.

Konsistensi kebijakan Jokowi tersebut dapat dianalisis bagaimana kebijakan *inward looking* Jokowi membuat tekanan politik domestik menjadi dasar dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Meninjau dari teori Snyder, PKS melakukan kontemplasi dengan advokasi politik yang berupa melakukan pernyataan pers, lobi dengan pemerintah pusat, aktivitas parlemen, diplomasi dengan negara negara dominan, mobilisasi massa dan melakukan demonstrasi. Hal yang paling menarik adalah ketika aktor PKS melakukan aksi irrasional dengan mendorong para kader PKS dan umat Islam di Indonesia untuk menyertakan doa Qunut Nazilah dalam shalat fardhu, misalnya dalam shalat subuh dan shalat witir selama ramadhan. K.H

Buchori Yusuf Selaku aktor juga mengatakan doa adalah senjata orang mukmin. Dan untuk saat ini, hal itu adalah salah satu pilihan rasional yang bisa dilakukan untuk membantu kaum muslimin di sana. Pengaruh PKS dapat dilihat secara empiris bagaimana partai Islam ini adalah partai organik yang basisnya adalah kader Jamaah Tarbiyah yang bertransformasi menjadi organisasi KAMMI yang basis massanya sangat kuat di Indonesia serta berorientasi program, membangun hubungan intensif kepada masyarakat lewat pendidikan politik dengan visi ke depan, dan memiliki keberpihakan yang tegas kepada konstituen. Keberpihakan tersebut membuat Palestina terus memperjuangkan isu Palestina karena ciri khas 'Islam' sebagai identitas utama yang dibawa PKS tersebut. Hasilnya adalah PKS dapat membangun opini publik terkait isu tentang Palestina serta menjadikan pemerintahan Jokowi harus tetap konsisten terhadap isu Palestina. Karena jika tidak, penulis memiliki asumsi bahwasanya instabilitas politik di Indonesia akan terjadi karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia dan didalamnya ada kelompok kepentingan seperti PKS yang selalu membawa isu Palestina.

Proses narasi PKS ini dapat dilihat dengan dua pembahasan yang sudah diuraikan oleh penulis yakni proses pembentukan PKS dengan faktor internal dan eksternal, faktor internalnya adalah dimana PKS diawali dengan kehidupan Jamaah Tarbiyah yang berkembang dengan mendirikan Lembaga Dakwah Kampus agar lebih kolektif dan dapat penetrasi di berbagai kampus seluler di Indonesia seperti di UGM, UI, ITB dan LDK bertransformasi menjadi FSLDK pada tahun 1986 dan pada tahun 1998 tokoh dari FSLDK mendeklarasikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim

Indonesia (KAMMI) di Universitas Muhammadiyah Malang yang akan dipimpin oleh Fahri Hamzah untuk pertama kalinya. Berdirinya KAMMI tentu menjadi kesempatan politik bagi kelompok Tarbiyah untuk memanfaatkan situasi politik pada orde baru yang mulai runtuh, Sejalan dengan berakhirnya rezim orde baru roda demokrasi tetap dijalankan dan tokoh KAMMI mengharuskan untuk mendirikan suatu partai Islam yang kemudian lahir Partai Keadilan (PK) pada 20 Juli 1998, Namun untuk memenuhi *electoral threshold* maka PK bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meskipun KAMMI dengan PKS tidak memiliki hubungan formal secara institusi, namun hal ini dibuktikan dengan alumni KAMMI yang memegang posisi kunci dalam struktur partai dan menjadi pemimpin daerah yang partai politiknya partai PKS, ini membuktikan bahwasanya fakta empiris antara KAMMI dan PKS itu memang benar adanya. Selain itu adalah faktor eksternal yang membelakangi berdirinya PKS tentu adalah organisasi transnasional tertua yang didirikan oleh Hassan al-Banna yakni Ikhwanul Muslimin. IM menjadi metode dari acuan utama bagi PKS dalam melakukan gerakan politiknya baik secara ideologi, politik, manhaj dakwah hingga pemahaman keislamannya, Pola IM sebagai hubungan ideologis dari Partai Keadilan Sejahtera dapat dilihat dari cara gerakan akar rumputnya yakni sistem dakwah yang berdasarkan *usrah, halaqah* dan Tarbiyah yang mengadopsi nilai dari Ikhwanul Muslimin. PKS juga membangun gagasan dengan memperjuangkan Islam sebagai solusi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengarahkan nilai ajaran Islam sebagai kekuatan transformatif dalam proses membangun umat dan bangsa yang sesuai dengan misi PKS yakni mewujudkan masyarakat madani dan merealisasikan *Ukhuwah Islamiyyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwah Basyariyyah*. Untuk merealisikannya PKS

tidak hanya melakukan proses politik seperti partai pada umumnya, namun PKS menjadikan mereka sebagai partai dakwah dengan gaya lebih politis.

Dewasa ini partai politik sering dinarasikan sebagai jalan untuk menuju parlemen atau pemangku kepentingan suatu negara, dengan hal tersebut partai seringkali diasosiasikan sebagai kendaraan politik yang akhirnya menjerumuskan kepada partai yang praktis, artinya partai tersebut hanya merealisasikan kepentingannya sebagai aktor politik, tidak dengan nilai sesungguhnya yakni wakil rakyat. PKS menghadirkan hal tersebut dimana pragmatisme partai ditangguhkan dengan partai yang bisa menyuarakan isu internasional terkhususkan isu Palestina. PKS memberikan *platform* yang koheren dan memiliki keunikan dalam menginterpretasikannya. Interpretasi terhadap prinsip bebas-aktif yang unik dan sejalan dengan jati diri Partai Keadilan Sejahtera tersebut memberikan pengaruh kepada dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina karena menciptakan tekanan domestik pada masa pemerintahan Jokowi.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan, menunjukkan bahwasanya penelitian ini fokus dalam menganalisa posisi PKS dalam pentas internasional dan melihat apakah ini suatu tujuan Islamisme atau hanya pragmatisme politik saja. Adanya batasan waktu yakni era Jokowi bisa memungkinkan PKS melakukan manuver politik yang bisa lebih moderat atau lebih konservatisme baik secara agama, sosial dan politik serta isu terkait umat

Islam masih banyak dan ada beberapa mungkin kedepan umat Islam akan didera masalah kembali dan pertanyaan tentang kehadiran PKS. Disamping itu, PKS sempat diterpa konflik internal yakni faksi keadilan dan faksi sejahtera yang memisahkan antara kubu konservatif dikenal dengan faksi keadilan dan faksi sejahtera dikenal dengan pembaharu. Akhir konflik internal tersebut menjadi inisiasi berdirinya organisasi masyarakat GARBI (Gerakan Arah Baru Indonesia) yang kemudian bertransformasi menjadi partai politik yakni partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia). Tentu perpecahan ini menjadi pertanyaan baru bagi penelitian selanjutnya apakah perpecahan tersebut membuat PKS akan lebih moderat karena faktor kehilangan nilai utamanya atau justru membuat PKS akan lebih konservatif karena aktor pembaharu yang dinilai lebih modernis telah keluar sehingga pusaran konservatisme Islam tetap ada di tubuh PKS dan para aktor ini akan lebih leluasa dalam menarasikan tujuan Islamismenya serta perpecahan tersebut apakah membuat posisi PKS dalam politik luar negeri lebih Islamis atau justru moderat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Caroline, and Sam Dodge. 2017. "Why the Muslim Brotherhood Is Key to the Qatar Standoff." *Bloomberg.Com*, June 7, 2017.
<https://www.bloomberg.com/graphics/2017-muslim-brotherhood/>.
- Amin, Ismail. 2021. "Oleh Gus Yahya, PB NU Akan Mendorong Normalisasi Indonesia Dengan Israel?" *Purnawarta*. December 25, 2021.
<https://purnawarta.com/analisa/oleh-gus-yahya-pb-nu-akan-mendorong-normalisasi-indonesia-dengan-israel/>.
- Anam, Haikal Fadhil. 2019. "Politik Identitas Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia." *POLITEA 2* (2): 181.
<https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5953>.
- Arrobi, Mohammad Zaki. 2020. *Islamisme ala Kaum Muda Kampus: Dinamika Aktivisme Mahasiswa Islam di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia di Era Pasca Soeharto*. UGM PRESS.
- Basyir, Ach. 2014. "IDEOLOGI POLITIK DILEMATIS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) ANTARA GERAKAN TARBIYAH DAN PRAGMATISME" 3 (2): 22.
- BPK. n.d. "UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri [JDIH BPK RI]." Accessed August 9, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45358>.
- CNN Indonesia. 2021. "Ahmad Syaikhu dan Kader PKS Demo Bela Palestina di Kedubes AS." *nasional*. May 20, 2021.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210520134255-20-644740/ahmad-syaikhu-dan-kader-pks-demo-bela-palestina-di-kedubes-as>.
- DPP Partai Keadilan Sejahtera. 2016. "PKS | PKS Apresiasi Ajakan Jokowi Terkait Lawan Penindasan Israel." March 8, 2016. <https://pks.id/content/pks-apresiasi-ajakan-jokowi-terkait-lawan-penindasan-israel>.
- . 2021. "PKS | Dukung Pemerintah Indonesia Bela Palestina, PKS: Kita Ingin Lebih Progresif." 2021. <https://pks.id/content/dukung-pemerintah-indonesia-bela-palestina-pks-kita-ingin-lebih-progresif>.
- Efriza, Nfn. 2019. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]." *Jurnal Politica Dinamika*

- Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 10 (1): 17–38.
<https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>.
- Erianto, Erianto. 2019. “The Position Of Islam In Foreign Policy During President Joko Widodo’s Government (2014-2019).” *Vox Populi* 2 (2): 120–31.
<https://doi.org/10.24252/vp.v2i2.12102>.
- Fanani, Ahmad Fuad. 2012. “SBY and the Place of Islam in Indonesian Foreign Policy.” Australia: Flinders University Adelaide Australia.
- Furkon, Aay Muhamad. 2004. *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi Dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Teraju.
- Hamayotsu, Kikue. 2015. “Democracy and Religious Pluralism in Southeast Asia : Indonesia and Malaysia Compared Kikue Hamayotsu.” In , 15.
- Hanifa, Afriza. 2014. “Jalan Panjang Lembaga Dakwah Kampus (1) | Republika Online.” February 22, 2014. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/02/22/n1e39z-jalan-panjang-lembaga-dakwah-kampus-1>.
- Hardianto, Susilo Josie B. 2021. “Komitmen dan Konsistensi Indonesia untuk Palestina.” *kompas.id*. May 24, 2021.
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/05/24/komitmen-dan-konsistensi-indonesia-untuk-palestina>.
- Hasan, Noorhaidi. 2020. “Dinamika Politik Islam di Indonesia Tahun 2020.” In *Islam Indonesia 2020*, by Azyumardi Azra, Zuly Qodir, Yusdani, Alimatul Qibtiyah, Nur Kholis, Krismono, Supriyanto Abdi, Hadza Min Fadhli Robby, Ahmad Sadzali, and Noorhaidi Hasan, 1st ed., 9–11. Yogyakarta: UII Press.
- Humas Fraksi PKS. 2021. “Bantu Perjuangan Rakyat Palestina, Aleg PKS Serukan Umat Islam Amalkan Qunut Nazilah.” Fraksi PKS. May 10, 2021.
<https://fraksi.pks.id/2021/05/10/bantu-perjuangan-rakyat-palestina-aleg-pks-serukan-umat-islam-amalkan-qunut-nazilah/>.
- Ilham. 2011. “Indonesia Negara Demokrasi Terbesar Ketiga Dunia.” *Tempo*. December 2, 2011. <https://nasional.tempo.co/read/369489/indonesia-negara-demokrasi-terbesar-ketiga-dunia>.

- Iswinarno, Chandra, and Novian Ardiansyah. 2021. "Protes Keberpihakan AS ke Israel, Presiden PKS Kirim Surat ke Joe Biden." *suara.com*. May 17, 2021. <https://www.suara.com/news/2021/05/17/181839/protes-keberpihakan-as-ke-israel-presiden-pks-kirim-surat-ke-joe-biden>.
- JPNN. 2020. "JPNN." *www.jpnn.com*. 2020. <https://www.jpnn.com/news/pks-apresiasi-pidato-jokowi-soal-dukungan-ke-palestina>.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2019. "Keanggotaan Indonesia Pada Dk Pbb | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia." 2019. https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019. "Isu Palestina | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia." 2019. https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina.
- Kompas. 2021. "Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional Halaman all." *KOMPAS.com*. May 16, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/16/17230291/kutuk-keras-serangan-israel-ke-palestina-pks-tindakan-israel-bertentangan>.
- Kraince, Richard G. 2000. "The Role of Islamic Student Groups in the Reformasi Struggle: KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)." *Studia Islamika* 7 (1). <https://doi.org/10.15408/sdi.v7i1.715>.
- Kusnandar, Budy Viva. 2021. "RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia | Databoks." 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>.
- Labolo, Muhadam, and Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. <http://eprints.ipdn.ac.id/16/>.
- Levitt, Matthew. 2006. *Hamas: Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad*. Yale University Press.

- Machmudi, Yon. 2008. "Introduction." In *Islamising Indonesia*, 1–20. The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS). ANU Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt24hddh.8>.
- Makin, Al. 2022. "Sekularisasi Versi Indonesia, Tidak Sekuler." *Rmol.Id.* 2022. <https://publika.rmol.id/read/2022/03/06/525848/sekularisasi-versi-indonesia-tidak-sekuler>.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2013. *Dilema PKS*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mukthi, M.F. 2014. "Sukarno dan Palestina." *Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia*. July 12, 2014. <https://historia.id/politik/articles/sukarno-dan-palestina-Dw5OP>.
- Populis. 2022. "Apa Itu Politik Identitas?" *Populis*. 2022. <https://populis.id/read23573/apa-itu-politik-identitas>.
- Rahmat, M Imdadun. 2008. *Ideologi Politik PKS Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. 1st ed. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Rinaldo, Rachel. 2013. "The Prosperous Justice Party: Islamizing Indonesia?," September. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199948109.003.0004>.
- RMOL. 2017. "PKS Kirim Surat Protes Ke Pemerintah AS." *Rmol.id*. 2017. <https://politik.rmol.id/read/2017/12/14/318210/pks-kirim-surat-protes-ke-pemerintah-as>.
- Robby, Hadza Min Fadhli. 2020. "Promosi Islam Wasathiyah Indonesia Ke Luar Negeri." In *Islam Indonesia 2020*, 237–40. 1. UII Press.
- Saifulmunjani. 2021. "Sikap Publik Nasional Terhadap Konflik Israel Dan Palestina - SaifulMujani." 2021. <https://saifulmujani.com/sikap-publik-nasional-terhadap-konflik-israel-dan-palestina/>.
- Situmorang, Mangadar. 2015. "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 11 (1). <https://doi.org/10.26593/jihi.v11i1.1442.%p>.
- Snyder, Richard C., H. W. Bruck, and Burton Sapin. 2002. "Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics." In *Foreign Policy Decision-Making (Revisited)*, by Richard C. Snyder, H. W. Bruck, and Burton Sapin,

- 21–152. New York: Palgrave Macmillan US.
https://doi.org/10.1057/9780230107526_2.
- Surahman, Titin Yuniartin. 2018. “Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera.”
KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi 12 (2): 257–74.
<https://doi.org/10.24090/komunika.v12i2.1325>.
- Ulfah, Novi Maria. 2016. “SEJARAH DAN STRATEGI DAKWAH IKHWANUL MUSLIMIN (The History and Strategy Da’wah of Ikhwanul Muslimin).”
Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) 2 (2): 215–16.
<https://doi.org/10.18784/smart.v2i2.397>.
- Wakik, Kiflan Ahmad. 2021. “Dorong Pemerintah Lebih Aktif Bantu Palestina, PKS Rencanakan Audiensi Dengan Kemenlu.” Rmol.Id. 2021.
<https://politik.rmol.id/read/2021/05/20/488699/dorong-pemerintah-lebih-aktif-bantu-palestina-pks-rencanakan-audiensi-dengan-kemenlu>.
- Widyarsa, Mohammad Riza. 2011. “Pengaruh Ideologi Politik Islam Di Indonesia Terhadap Partai Politik Di Indonesia. Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera.”
JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL 1 (1): 27–35.
- Worldview. 2019. “Labeling the Muslim Brotherhood as Terrorists Invites Complications for the U.S.” Stratfor. 2019.
<https://worldview.stratfor.com/article/article/labeling-muslim-brotherhood-terrorists-invites-complications-us>.